



Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Penderita Psikotik di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih Surabaya

Nira Zhafirah Puspitasari*, Ertien Rining Nawangsari

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Surabaya, Indonesia;

Kata Kunci

Kata kunci: Manajemen Strategi, Gelandangan Psikotik, Liponsos Keputih.

Abstrak

Kota Surabaya menjadi pusat populasi terbesar Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat di Provinsi Jawa Timur dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 sebanyak 5519 jiwa. ODGJ merupakan salah satu kelompok yang rentan terabaikan dan menjadi korban penelantaran dengan berbagai alasan faktor sosial, faktor ekonomi, faktor kesehatan, dan lain-lain. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial Kota Surabaya dalam hal ini telah melakukan langkah guna menangani permasalahan tersebut salah satunya dengan membangun Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkungan Pondok Sosial (UPTD Liponsos) Keputih. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perumusan strategi menggunakan komunikasi dan koordinasi dengan para *stakeholders*. 2) Implementasi strategi dilakukan melalui 4 cara yaitu rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi kepada tenaga kerja dalam hal *capacity building* untuk *transfer knowledge* dan juga melakukan perotasian atau *tour of duty*. 3) Evaluasi strategi dilakukan monitoring secara terstruktur dan baik serta membuat skala prioritas dan koordinasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD).

Keywords

Keywords: *Strategic Management, Psychotic Tramp, Liponsos Keputih.*

Abstract

The city of Surabaya is the center of the largest population of people with severe mental disorders (ODGJ) in East Java Province and continues to increase until 2020 to as many as 5519 people. ODGJ are one of the groups that are vulnerable to being neglected and become victims of neglect for various reasons such as social factors, economic factors, health factors, and others. The Surabaya City Government through the Surabaya City Social Service in this case has taken steps to deal with these problems, one of which is by building the Keputih Regional Environmental Technical Implementation Unit (UPTD Liponsos). The research method used is qualitative research and uses data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results and conclusions of this study indicate that: 1) Strategy formulation uses communication and coordination with stakeholders. 2) Strategy implementation is carried out in 4 ways: social rehabilitation, social empowerment, social protection, and social security. Furthermore, socialization was carried out in the workforce in terms of capacity building for knowledge transfer and also conducting rotations or tours of duty. 3) Strategy evaluation is carried out by monitoring in a structured and good manner by making a priority scale and coordinating with regional apparatus organizations (OPD).

*Corresponding Author: **Nira Zhafirah Puspitasari**, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Surabaya, Indonesia
Email: ertien_rining.adneg@upnjatim.ac.id

PENDAHULUAN

Gelandangan penderita psikotik secara umum dimaknai sebagai orang gelandangan yang memiliki ciri-ciri khusus dengan perilaku abnormal yang berbeda dengan norma perilaku manusia. Gelandangan psikotik ini selain hidup menggelandang atau terlantar juga mengalami atau menderita gangguan jiwa berat yang menyebabkan kehilangan fungsi sosialnya (Chulaifah & Prastyowati, 2016). Salah satu kota yang tidak lepas dari adanya gelandangan psikotik adalah Kota Surabaya. Selain itu, Kota Surabaya juga menjadi kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Hal ini disebabkan pesatnya pertumbuhan kota dan tidak meratanya pemerataan pembangunan yang merata serta adanya migran yang datang di kota-kota besar tanpa mempunyai tujuan dan berkeliaran di jalan, sehingga para gelandangan ini merupakan tanggungjawab bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan permasalahan yang berada di masyarakat (Sriyana, 2021).

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bahwa sasaran pelayanan kesejahteraan sosial yaitu gelandangan penderita psikotik. Kota Surabaya menjadi pusat populasi terbesar ODGJ berat di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Kota Surabaya juga mengalami peningkatan pada tahun 2019 sejumlah 5503 jiwa menjadi 5519 jiwa di tahun 2020. Sebagian besar, ODGJ masih belum mendapatkan bantuan dalam penanganan keadaan tersebut. Tanpa adanya bantuan yang tepat akan dikhawatirkan permasalahan tersebut semakin memburuk karena orang dengan gangguan jiwa ini dapat membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain.

Menurunnya tingkat produktivitas akibat gangguan jiwa mempengaruhi pada perkembangan dan pertumbuhan negara baik dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, hak asasi manusia (HAM) dan lain sebagainya. Stigma, mitos dan kesalahpahaman seputar gangguan jiwa mendasari banyak diskriminasi dan pelanggaran HAM yang dihadapi oleh ODGJ setiap hari. ODGJ merupakan salah satu kelompok yang rentan terabaikan dan menjadi korban penelantaran dengan berbagai alasan faktor kemiskinan, keluarga tidak dapat merawatnya, keluarga malu, menganggap sebagai aib, kurangnya pengetahuan tentang penyakit gangguan jiwa, dan masih mendapatkan stigma bahwa ODGJ berbahaya (Harjani & Fawzi, 2021). Dengan memberikan pengetahuan terkait kesehatan jiwa kepada masyarakat, maka secara bertahap stigma bahwa 'ODGJ berbahaya' akan sedikit demi sedikit berkurang.

Dalam hal ini, Kota Surabaya memiliki kepedulian dalam menangani masalah ODGJ. Penyakit yang diderita oleh para ODGJ merupakan penyakit

yang cukup serius dimana penyakit tersebut bisa terkendalikan atau sembuh bukan dengan jangka waktu yang singkat melainkan membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Selain itu, masyarakat perkotaan merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan mengalami stres dan paling tinggi tingkat stresnya. Hal ini disebabkan karena hidup di perkotaan memiliki daya tekan yang tinggi baik dari segi perekonomian, lingkungan, maupun sosial (Indriani & Nodia, 2017).

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial Kota Surabaya dalam hal ini telah melakukan langkah guna menangani permasalahan tersebut salah satunya dengan membangun Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkungan Pondok Sosial (UPTD Liponsos) Keputih. UPTD Liponsos Keputih sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih Pada Dinas Sosial Kota Surabaya pada pasal 5 menjelaskan terkait tugas dan fungsi, dimana UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang sosial khususnya rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, gelandangan penderita psikotik, tuna susila dan anak jalanan. Selanjutnya, pada pasal 6 huruf (i) dijelaskan bahwa UPTD mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan sosial dasar berupa penanganan khususnya pada gelandangan penderita psikotik.

UPTD Liponsos Keputih mengutamakan para ODGJ yang berasal dari hasil razia, penyerahan warga, dan keluarga tidak mampu untuk mendapatkan rehabilitasi sosial. Selama berada di Liponsos Keputih, Dinas Sosial berkewajiban menyediakan kebutuhan dasar, memberikan pelayanan sosial maupun kesehatan serta bimbingan sosial. Sebagaimana dapat dilihat populasi PMKS di UPTD Liponsos keputih berikut:

Tabel 1.1. Populasi PMKS di UPTD Liponsos Keputih per Maret 2022

Jenis PMKS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Gelandangan	45	19	64
Gelandangan Psikotik	370	192	562
Pengemis	6	8	14
Pengamen	9	2	11
Lansia Terlantar	27	31	58
Anak Terlantar	0	3	3
Orang Terlantar	3	3	6
Total	720	Surabaya: 300 Non: 420	

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, (diolah oleh penulis 2022).

Tabel di atas menunjukkan bahwa gelandangan psikotik atau biasa yang disebut dengan ODGJ merupakan PMKS dengan jumlah populasi terbanyak dan yang paling banyak ditangani oleh pihak UPTD Liponsos Keputih Surabaya. Selain itu, populasi PMKS

di UPTD Liponsos Keputih juga didominasi oleh penduduk luar Surabaya.

Adanya penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan peneliti yaitu milik Safitri et al., (2017) yang berjudul Koordinasi Dalam Penanganan Gelandangan Psikotik Di Kota Bandung. Fokus penelitian tersebut menggunakan analisis teori koordinasi efektif yang dikemukakan oleh State Service Commission (2008). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dalam penanganan gelandangan psikotik belum sepenuhnya berkaitan dengan dimensi mandat, dimensi sistem dan dimensi perilaku, dimana hanya beberapa hal saja yang sudah cukup baik dan sudah dipenuhi dari ketiga dimensi tersebut, yaitu yang berkaitan dengan keterlibatan stakeholder, kecukupan dan ketersediaan sumber daya dan budaya organisasi yang mendukung koordinasi.

Dalam kajian ini yang akan dibahas oleh peneliti adalah perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan psikotik di Liponsos Keputih Surabaya. Terkait dengan relevansi permasalahan penelitian dengan teori manajemen strategi dari Fred R. David (2019), dapat dijelaskan bahwa masih adanya kendala dalam penanganan gelandangan psikotik di Liponsos Surabaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Strategi

Menurut Mardiasmo dalam Ningtihana et al., (2021) strategi merupakan suatu cara yang digunakan organisasi untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Suatu strategi memuat serangkaian petunjuk yang menjelaskan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan mengarahkannya pada visi. Menurut Kotten dalam Salusu (2006:105) membagi bentuk-bentuk strategi menjadi empat bagian, yaitu: *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi), *Program Strategy* (Strategi Program), *Recourse Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya), *Institusional Strategy* (Strategi Kelembagaan).

Menurut Cinthya et al., (2020) Strategi dapat disebut sebagai suatu rencana untuk melakukan suatu tindakan. Pada hakekatnya, strategi merupakan suatu perencanaan dan manajemen dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dengan begitu, dalam mencapai tujuan tersebut strategi berfungsi sebagai petunjuk pelaksana operasional dan petunjuk arah suatu taktik tersebut.

Menurut David (2019:3) manajemen strategi dapat diartikan sebagai seni dan ilmu dari perumusan, pengaplikasian, dan evaluasi dari berbagai keputusan yang memungkinkan perusahaan untuk dapat mencapai

tujuannya. Tujuan manajemen strategi adalah memanfaatkan dan membuat kesempatan/oportunitas baru dan berbeda untuk masa depan. Proses manajemen strategi terdiri dari 3 tahap, yaitu:

1. Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*)
Keputusan formulasi strategi mengikat organisasi terhadap pembinaan, sumber daya, dan teknologi tertentu untuk periode yang lebih panjang. Perumusan strategi terdiri dari beberapa kegiatan:
 - a. Mengembangkan visi dan misi.
 - b. Mengidentifikasi kesempatan dan ancaman eksternal.
 - c. Menentukan kekuatan dan kelemahan internal.
 - d. Menciptakan tujuan jangka panjang.
 - e. Memulai strategi alternatif.
 - f. Memilih strategi khusus untuk dicapai.
2. Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*)
Mengimplementasikan strategi artinya menggerakkan pegawai dan manajer untuk mengubah strategi yang di formulasikan menjadi suatu tindakan. Sering dianggap sebagai tahapan paling sulit dalam manajemen strategi, implementasi strategi membutuhkan disiplin, komitmen, dan pengorbanan personal. Syarat utama keberhasilan implementasi strategi adalah kemampuan interpersonal. Implementasi strategi terdiri dari beberapa kegiatan berikut:
 - a. Perumusan tujuan tahunan.
 - b. Kebijakan yang memotivasi karyawan.
 - c. Pengalokasian sumber daya
3. Evaluasi Strategi (*Strategy Evaluation*)
Evaluasi strategi merupakan tahapan final dalam manajemen strategi. Fungsi pokok agar manajer dapat mengetahui informasi tentang keberhasilan strategi yang telah dilaksanakan. Berikut tiga kegiatan fundamental evaluasi strategi:
 - a. Mereview faktor eksternal dan internal dari strategi yang dilaksanakan
 - b. Mengukur kinerja
 - c. Mengambil tindakan korektif

Gelandangan Psikotik

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada pasal 15 ayat (3) huruf a menjelaskan bahwa Gelandangan Psikotik adalah seseorang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, mempunyai tingkah laku aneh dan menyimpang dari norma-norma yang ada atau seseorang bekas penderita penyakit jiwa, yang telah mendapatkan pelayanan medis dan telah mendapat surat keterangan sembuh dan tidak mempunyai keluarga serta kurang mampu dan perlu mendapatkan bantuan untuk hidup. Dengan demikian pengertian gelandangan psikotik adalah seseorang yang hidup terlantar serta tidak mempunyai tempat tinggal

dan pekerjaan yang tetap dan memiliki gangguan kejiwaan mengalami delusi dan halusinasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan maksud ingin memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang strategi Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan penderita psikotik di Liponsos Keputih Surabaya. Menurut Bogdan dan Taylor dikutip Moleong (2019:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller dikutip Moleong (2019:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Penelitian ini menggunakan data primer serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman dimana analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), tampilan data (*data display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion: drawing/verifying*). Untuk mendapatkan keabsahan data maka diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Sugiyono (2019) ada empat kriteria yang digunakan yaitu uji *credibility* (Validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), *Confirmability* (Objektivitas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

UPTD Liponsos Keputih sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih Pada Dinas Sosial Kota Surabaya pada pasal 5 menjelaskan terkait tugas dan fungsi, dimana UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang sosial khususnya rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, gelandangan penderita psikotik, tuna susila dan anak jalanan. Selanjutnya, pada pasal 6 huruf (i) dijelaskan bahwa UPTD mempunyai fungsi pelaksanaan

pelayanan sosial dasar berupa penanganan khususnya pada gelandangan penderita psikotik.

Strategi merupakan suatu cara atau tindakan yang digunakan dalam mencapai tujuan. Dimana cara ini dapat dirumuskan dengan matang sehingga jelas nantinya apa yang sedang dilaksanakan oleh organisasi demi menentukan dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Maka, pada dasarnya strategi merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan. Menurut Rangkuti (2008) strategi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tipe strategi yakni, strategi manajemen, strategi investasi, dan strategi bisnis.

Untuk mengetahui strategi apa yang sudah dilakukan Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan psikotik di Liponsos Keputih Surabaya penulis menggunakan analisis teori manajemen strategi menurut David (2019) meliputi 3 tahapan strategi diantaranya perencanaan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

Perumusan Strategi

Menurut David (2019) perumusan strategi berkaitan dengan mengidentifikasi peluang dan ancaman dari eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan dari internal organisasi, membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai.

Komunikasi dan koordinasi dengan para stakeholders merupakan strategi dalam tahapan perumusan strategi. Aspek komunikasi dan koordinasi antar stakeholders ini menjadi dua poin penting dalam perumusan strategi yang harus digabungkan dalam penanganan gelandangan psikotik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Lubis et al., (2019) bahwa dalam komunikasi telah mencakup unsur informasi dan dalam koordinasi juga sudah mencakup unsur kerja sama. Kedua bagian tersebut yaitu komunikasi dan koordinasi memerlukan sistem yang terpadu atau terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat agar penanganan yang diberikan berjalan sesuai rencana.

Strategi tersebut memudahkan dalam identifikasi, verifikasi dan assessment. Adanya penyaluran ke balai rehabilitasi milik Kemensos ataupun milik Provinsi. Disamping itu, proses pemulangan ke daerah asalnya juga dilakukan Dinsos Surabaya sehingga populasi yang ada di Liponsos Keputih dapat terus berkurang dan tidak menjadi overload lagi. Dinsos Surabaya melibatkan peran serta dari pilar-pilar sosial yang ada dengan membangun kerjasama bersama lembaga-lembaga sosial atau relawan sosial. Menurut Tursilarini (2009) tujuan utama dari koordinasi yaitu terjadinya penyaluran, artinya koordinasi merupakan suatu

usaha untuk menyatukan kegiatan dari berbagai macam unit kerja yang mempunyai tugas yang berbeda dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dari berbagai macam usaha untuk mencapai tujuan bersama. Hal tersebut sesuai dengan tujuan Dinas Sosial Kota Surabaya yakni agar Kota Surabaya aman, bersih, dan terbebas dari masalah-masalah sosial yang ditimbulkan oleh gelandangan psikotik. Kemudian, tidak ada lagi mereka gelandangan psikotik yang ditemukan bekerja di jalan-jalan protokol dan perempatan lampu merah. Selain itu, di UPTD Liponsos Keputih ini juga dapat mengurangi populasi gelandangan psikotik yang menetap di Liponsos Keputih agar tidak sampai overkapasitas dan fokus kepada gelandangan psikotik yang masih berada disana.

Namun, fakta dilapangan masih terdapat hambatan dari sarana dan prasarana, seperti kurangnya jumlah sarana keterampilan untuk terapi aktivitas dan terdapat bangunan yang sudah rusak. Kemudian, masih terdapat hambatan pada proses realisasi anggaran yang menjadikan Dinsos harus menutupi kekurangan dana terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam kompetensi SDM apabila terdapat tenaga pendamping yang hanya memiliki simpati dan empati kepada gelandangan psikotik masih tetap diteruskan. Tetapi, SDM yang dibutuhkan tidak hanya sekedar simpati dan empati tetapi juga kompetensi di bidangnya. Selain itu, terbatasnya personil tenaga pendamping yang menangani klien. Ideal perbandingannya yaitu 1:6 dengan proporsi 1 tenaga pendamping mendampingi 6 ODGJ. Tidak idealnya populasi klien dengan tenaga pendamping yang ada dapat mengakibatkan tidak tertangani lebih maksimal. Karena yang dikhawatirkan nantinya apabila yang awalnya ODGJ sudah menjadi ringan akan menjadi gangguan jiwa berat lagi karena tidak tertangani dengan fokus. Selanjutnya, kurangnya pengetahuan kepada keluarga ODGJ tentang kesehatan jiwa dan komitmen untuk merawatnya ini di dukung dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa pasal 7 ayat (1) huruf c yang menjelaskan bahwa upaya promotif kesehatan jiwa ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap kesehatan jiwa.

Implementasi Strategi

Tahap implementasi strategi membutuhkan disiplin, komitmen, dan pengorbanan personal. Menurut David (2019) implementasi strategi berkaitan dengan penerapan strategi, kebijakan yang

memotivasi karyawan, dan pengalokasian sumber daya. Tahapan implementasi strategi yaitu menjelaskan tentang penerapan penanganan gelandangan psikotik, sosialisasi dalam memotivasi pegawai, dan mengalokasikan SDM di UPTD Liponsos Keputih.

Penerapan ini dilakukan melalui 4 cara yaitu rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial. Hal tersebut di dukung dengan adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 6 yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pengobatan jiwa ini dilakukan dengan cara terapi komunikasi dan terapi aktivitas kelompok. ODGJ yang kooperatif atau komunikasinya sudah lancar maka akan diberi terapi aktivitas, dimana terapi aktivitas ini berupa kegiatan baris-berbaris, kegiatan bersih-bersih, dan merawat pasien yang luka bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosialnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Maulana et al., (2021) pada praktek keperawatan jiwa penggunaan terapi aktivitas kelompok ini akan memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan.

Dinsos Surabaya telah melaksanakan sosialisasi kepada tenaga kerja dalam hal capacity building dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten seperti Dokter Spesialis Jiwa untuk transfer knowledge. Dinsos Surabaya memberikan pemahaman dalam hal menambah ilmu agar pekerja sosial Liponsos mengetahui gambaran akan tugas dan tanggung jawabnya serta diharapkan dapat menutupi kekurangan tersebut agar tidak terjadi maltreatment. Hal tersebut sejalan dengan Kurniawan et al., (2017) yang mengartikan capacity building merupakan suatu proses peningkatan berkelanjutan dari individu, organisasi, atau institusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mencapai tujuan kinerja yang efektif. Identifikasi terkait SDM dilakukan melalui evaluasi yang selanjutnya akan dilakukannya rotasi atau tour of duty yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM tersebut mendekati sesuai dengan kompetensi yang dia miliki.

Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan tahapan final dalam manajemen strategi. Fungsi pokok agar manajer dapat mengetahui informasi tentang keberhasilan strategi yang telah dilaksanakan. Menurut David (2019) perumusan strategi berkaitan dengan Monitoring faktor eksternal dan internal dari strategi yang dilaksanakan, Mengukur kinerja organisasi, dan Mengambil tindakan korektif.

Secara sistematis Dinas Sosial Kota Surabaya telah melakukan monitoring secara terstruktur dan baik. Dimulai dari monitoring oleh internal organisasi dalam hal ini Dinsos Surabaya maupun dari eksternal organisasi seperti OPD lain dan Inspektorat Jenderal yang datang secara rutin untuk mengevaluasi terkait kekuatan dalam penggunaan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Trisianto (2018) yang mendefinisikan bahwa monitoring merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk memantau atau meninjau jalannya kegiatan berlangsung dan menilai ketercapaian tujuan serta melihat faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program.

Mengukur kinerja organisasi terhadap penanganan gelandangan psikotik ini melalui pemulangan. Apabila pencapaian pemulangan ini semakin banyak maka penanganan yang diberikan juga semakin baik. Namun, fakta dilapangan terkait pemulangan belum mencapai target sasaran. Hal ini dapat dilihat dari SDM yang tersedia belum berfungsi secara optimal, dimana dari sisi kesehatan belum bisa mengembalikan kondisi jiwa dan fisiknya serta dari sisi sosialnya belum dapat mengembalikan fungsi sosialnya berupa bisa melakukan aktivitas sehari-hari atau ADL dengan baik. Sehingga pencapaian pemulangan berdasarkan data grafik pencapaian pemulangan ODGJ dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dinas Sosial Kota Surabaya. Dinsos Surabaya juga melakukan kerjasama dengan para stakeholders yang punya kepentingan dengan penanganan ODGJ contohnya Rumah Sakit Jiwa, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran yang ditempatkan di sana untuk magang. Peluang kerjasama untuk magang tersebut bisa dapat membantu Dinsos dalam membackup keterbatasan SDM yang ada di Liponsos. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mutaqien dalam Setyawan (2018) yang mengungkapkan bahwa kinerja organisasi adalah suatu konsep yang memperlihatkan gambaran keberhasilan organisasi dalam tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Pengukuran kinerja bertujuan untuk menyampaikan arahan dalam menyusun rencana kerja serta untuk bahan evaluasi kerja yang sudah dilakukan dalam mencapai sasaran organisasi. Selanjutnya, dalam mengambil langkah korektif untuk perbaikan dilakukan dengan cara membuat skala prioritas.

Evaluasi strategi pada tahapan manajemen

strategi dapat disimpulkan bahwasannya kurang behasil dilaksanakan. Sebab, pada mengukur kinerja organisasi yang dilakukan melalui pemulangan mengalami penurunan yang sangat signifikan berdasarkan data dari Dinsos Kota Surabaya tercatat dari tahun 2019 sejumlah 304 ODGJ, tahun 2020 sejumlah 103 ODGJ, dan hingga tahun 2021 menjadi 91 ODGJ. Pencapaian pemulangan tersebut belum mencapai target sasaran, hini dapat dilihat dari SDM yang tersedia belum berfungsi secara optimal

KESIMPULAN

Strategi Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan psikotik di UPTD Liponsos Keputih Surabaya dengan menggunakan analisis teori manajemen strategi dapat ditarik kesimpulan cukup berhasil. Walaupun terkendala pada kurangnya sarana keterampilan untuk ODGJ, prasarana yang rusak, hambatan pada realisasi anggaran, SDM yang terbatas dan tidak berkompeten dalam bidangnya, kurangnya pengetahuan dan komitmen untuk merawatnya terhadap keluarga ODGJ. Serta, dalam mengukur kinerja pada pelaksanaan pencapaian pemulangan gelandangan psikotik masih belum optimal. Akan tetapi, beberapa indikator telah tercapai dengan baik dan telah sesuai dengan 3 tahapan manajemen strategi menurut David (2019), meskipun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dialami, namun tidak mengganggu keberhasilan manajemen strategi.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih disampaikan oleh peneliti kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian artikel ini terutama kepada Pegawai Dinas Sosial Kota Surabaya yangtelah memberikan data dan informasi serta dukungan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Chulaifah, & Prastyowati, S. (2016). Tingkat Keberhasilan Rehabilitasi Gelandangan Eks-Psikotik. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 15(1), 35–46. <https://Ejournal.Kemensos.Go.Id/Index.Php/Jpks/Article/Download/1343/750>
- Cintha, R. D., Syafirah, L., & Nawangsari, E. R. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Umkm Batik Teyeng Kecamatan Benowo Kota Surabaya) Community Empowerment Strategy (Case Study Of Micro Small And Medium Enterprises Batik Teyeng , District Benowo , Surabaya City) Teknik ,

- Teknologi Serta P. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(3).
- David, F. R. (2019). *Manajemen Strategi: Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing-Konsep* (15th Ed.). Jakarta:Salemba Empat-Cetakan Ketiga.
- Dinas Sosial Kota Surabaya. (2022). Populasi Jumlah Pmks Di Uptd Liponsos Keputih Surabaya
- Harjani, & Fawzi, I. L. (2021). Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Telantar Di Psbl 1 Dki Jakarta. *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 56–66. <https://doi.org/10.15408/Empati.V10i1.20405>
- Indriani, R., & Nodia, F. (2017). Ini Penyebab Masyarakat Kota Alami Tingkat Stres Tertinggi. *Suara.Com*. <https://www.suara.com/lifestyle/2017/04/12/170749/ini-penyebab-masyarakat-kota-alami-tingkat-stres-tertinggi>
- Kurniawan, D., Puluhalawa, J., & Wantu, S. M. (2017). Capacity Building Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Kinerja Guru (Studi Kasus Guru Ppkn Smp Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo). *Jurnal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*, 02(2).
- Lubis, F. W., Sabarina, Y., & Masril, M. (2019). Penanganan Bencana Erupsi Gunung Sinabung Ditinjau Dari Aspek Komunikasi Dan Koordinasi. *Jurnal Simbolika*, 5(1), 1–22.
- Maulana, I., Hernawati, T., & Shalahuddin, I. (2021). Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok Terhadap Penurunan Tingkat Halusinasi Pada Pasien Skizofrenia: Literature Review. *Jurnal Keperawatan Jiwa (Jkj): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 9(1).
- Moleong, Lexy J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Ningtihana, I. R., Cikusin, Y., & Abidin, A. Z. (2021). Strategi Dinas Sosial Kota Batu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lansia) Terlantar (Studi Kasus Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu) Jurusan Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Islam Malang , Jl. *Jurnal Respon Publik*, 15(8), 51–56.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih Pada Dinas Sosial Kota Surabaya.
- Rangkuti, F. (2008). *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Safitri, A. H., Widianingsih, I., & Halimah, M. (2017). Koordinasi Dalam Penanganan Gelandangan Pikotik Di Kota Bandung. *Jane - Jurnal Administrasi Negara*, 2(1), 10–20. <https://doi.org/10.24198/Jane.V2i1.13678>
- Setyawan, D. (2018). Pendekatan Balance Scorecard Untuk Pengukuran Kinerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 12(2).
- Sriyana. (2021). *Masalah Sosial Kemiskinan, Pemberdayaan, Dan Kesejahteraan Sosial*. Cv Literasi Nusantara Abadi.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Trisianto, C. (2018). Penggunaan Metode Waterfall Untuk Pengembangan Sistem Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Esit (E-Bisnis, Sistem Informasi, Teknologi Informasi)*, 2(1).
- Tursilarini, T. Y. (2009). Stakeholders Dalam Penanganan Gelandangan Psikotik Di Daerah. *Sosio: Konsepsia Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 14(2).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.